

Hubungan Kapasitas Inovasi Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

John Fery Sonoto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan kependidikan,
Universitas Hein Namotemo, Tobelo, Indonesia
email: johnsonotounhena@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa kapasitas inovasi dapat meningkatkan kinerja kemandirian keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan CT penelitian ini memfokuskan terhadap bagaimana kemampuan pemerintah daerah menanggapi perubahan dan tantangan dengan responsif dan efektif melakukan inovasi untuk mengelola sumber daya yang terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional untuk menganalisis hubungan antara rasio kemandirian keuangan dan kapasitas adaptasi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2010 mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang membuat pemerintah daerah lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan pembangunan. Selain itu, mereka cenderung lebih inovatif dalam mengelola sumber daya lokal, seperti dengan meningkatkan pajak daerah, retribusi, atau memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan PAD. Akhirnya, peneliti berkesimpulan bahwa rasio kemandirian keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan ekonomi atau kebijakan fiskal secara nasional.

Kata kunci: Rasio kemandirian keuangan, Teori Kapasitas, Pemerintah Daerah, Adaptif, Tata kelola.

Abstract

This study aims to examine whether innovation capacity can improve the performance of local government financial independence. Through the CT approach, this study focuses on how local governments respond to changes and challenges responsively and effectively innovate to manage limited resources. The study uses a quantitative approach and a correlational research design to analyze the relationship between the financial independence ratio and the adaptive capacity of local governments. This study uses financial data from the local government of North Halmahera Regency for the 2008, 2009, and 2010 budget years. The findings of this study indicate that the increase in the financial independence ratio in 2010 reflects the efficiency of local financial management, which makes local governments more flexible and adaptive to economic changes and development needs. In addition, they tend to be more innovative in managing local resources, such as by increasing local taxes, levies, or utilizing the potential of natural resources to increase PAD. Finally, the researcher concludes that the financial independence ratio plays an important role in increasing the adaptive capacity of local governments to economic changes or fiscal policies nationally.

Keywords: Financial independence ratio, capacity theory, Local government, Adaptive, Governance.

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Hanif & Handoyo, 2024). Salah satu yang selalu menjadi isu utama adalah kemampuan inovasi pemerintah daerah agar tidak menciptakan ketergantungan melainkan kemandirian keuangan daerah (Mahadiansar et al., 2020). Kemandirian keuangan adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu pemerintah daerah dapat membiayai pengelolaan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau bantuan eksternal lainnya (Putri and Munandar 2021; Sonoto 2018). Dalam konteks pemerintahan daerah, rasio kemandirian keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai kebijakan dan program pembangunan secara mandiri (Putra & Hidayat, 2016). Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal pemerintah daerah mendukung program pemerintah

pusat yang bertujuan untuk menggalakkan efisiensi anggaran, mengingat daerah yang mandiri secara finansial akan lebih mampu mengelola anggarannya dengan bijak (M Taufan Rengganis, 2025). Salah satu bentuk efisiensi anggaran yang didorong oleh pemerintah pusat adalah pengurangan belanja-belanja yang tidak produktif dan tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti belanja perjalanan dinas, uang makan, dan biaya operasional lainnya yang seringkali tidak membawa manfaat langsung bagi kepentingan Masyarakat (jdih.setneg.go.id, 2025) . Dengan adanya kemandirian keuangan yang tinggi, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang benar-benar mendukung pembangunan dan pelayanan publik, seperti program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Sudaryo et al., 2021). Di sisi lain, daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang tinggi cenderung lebih fleksibel dalam merancang kebijakan dan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Tangkilisan, 2005).

Pada kondisi seperti ini, peneliti berpendapat bahwa dibutuhkan kepala daerah yang memiliki kemampuan adaptasi yang berorientasi masa depan dalam mengelola pemerintahannya (Cagnin et al., 2013). Pemimpin yang berkapasitas untuk melakukan adaptasi didasarkan pada kapasitas yang dimilikinya. *Capacity Theory* (CT) berfokus pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dan merespons dengan efektif terhadap perubahan eksternal, baik itu dalam konteks perubahan ekonomi, kebijakan fiskal, atau bencana alam (Vlachos, Georgiadis, and Iakovou 2007; Smit and Wandel 2006). Pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang lebih tinggi diperkirakan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merespons perubahan lingkungan tersebut, karena mereka memiliki cadangan sumber daya yang lebih besar dan kontrol lebih atas anggaran.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada hubungan antara rasio kemandirian keuangan dan kemampuan adaptasi pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan, yang menunjukkan seberapa besar proporsi pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber daya internal, dianggap mempengaruhi sejauh mana pemerintah daerah dapat menghadapi dan mengatasi perubahan yang tidak terduga (M Taufan Rengganis 2025; Vlachos et al. 2007).

- a. *Rasio Kemandirian Keuangan*: Menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber daya eksternal (seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Semakin tinggi rasio ini, semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, yang meningkatkan fleksibilitas keuangan daerah (Putri and Munandar 2021; Sonoto 2018; Putra and Hidayat 2016).
- b. *Capacity Theory*: Merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi perubahan dan tantangan yang ada dengan cara yang responsif dan efektif. Kapasitas dinamis ini mencakup kemampuan dalam merancang kebijakan yang adaptif, merespons bencana atau krisis dengan cepat, dan melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya (Vlachos et al. 2007; Smit and Wandel 2006; Cagnin, Havas, and Saritas 2013).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pada hubungan yang kompleks antara rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang tidak terduga (Putra & Hidayat, 2016). Rasio kemandirian keuangan yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana eksternal, seperti dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, yang pada gilirannya memberikan keleluasaan lebih bagi daerah dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan (M Taufan Rengganis, 2025). Namun, belum ada konsensus yang jelas mengenai sejauh mana rasio kemandirian keuangan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi, terutama dalam menghadapi kondisi darurat, bencana, atau perubahan

sosial-ekonomi yang cepat. Salah satu permasalahan utama adalah apakah daerah dengan rasio kemandirian keuangan yang tinggi benar-benar memiliki kapasitas yang lebih baik untuk merespons krisis dan melakukan inovasi dalam kebijakan atau jika faktor-faktor lain, seperti kepemimpinan daerah, kualitas manajerial, atau kondisi ekonomi lokal, justru memainkan peran yang lebih dominan dalam mempengaruhi kemampuan adaptasi (Vlachos, Georgiadis, and Iakovou 2007; Smit and Wandel 2006). Di sisi lain, pemerintah daerah dengan rasio kemandirian rendah mungkin merasa lebih terbatas dalam merespons perubahan dengan cepat, tetapi apakah mereka juga memiliki mekanisme adaptasi alternatif, seperti pengelolaan sumber daya yang efisien atau kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat atau pihak eksternal lainnya, tetap menjadi pertanyaan yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menggali lebih dalam bagaimana interaksi antara rasio kemandirian keuangan dan faktor-faktor kontekstual lainnya mempengaruhi responsivitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan yang tidak terduga.

Penelitian ini memiliki kebermanfaatan yang signifikan baik bagi akuntansi sektor publik maupun praktik pengelolaan keuangan daerah. Secara teori, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara rasio kemandirian keuangan dan kapasitas adaptasi pemerintah daerah, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang keuangan daerah dan manajemen adaptasi. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah dalam merancang kebijakan anggaran yang lebih mandiri, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan atau krisis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan (Putra & Hidayat, 2016). Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan alat ukur baru untuk menilai kinerja pemerintah daerah, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi finansial, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam beradaptasi dengan tantangan yang ada, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Artinya, bahwa penting bagi para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memahami angka-angka dalam rasio kemandirian keuangan, karena ini akan menentukan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis ekonomi atau bencana alam, kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan sangat bergantung pada sejauh mana mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan hubungan rasio kemandirian keuangan terhadap kemampuan adaptasi pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan eksternal: Bagaimana rasio kemandirian keuangan mempengaruhi kemampuan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan ekonomi atau kebijakan fiskal secara nasional? Artinya bahwa perubahan ekonomi, seperti adanya kebijakan efisiensi atau fluktuasi pendapatan daerah, dapat mempengaruhi kebijakan fiskal daerah. Bagaimana daerah dengan rasio kemandirian keuangan tinggi atau rendah merespons perubahan ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional untuk menganalisis hubungan antara rasio kemandirian keuangan dan kapasitas adaptasi pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder tentang rasio kemandirian keuangan daerah dan kapasitas adaptasi pemerintah daerah dalam merespons perubahan atau krisis. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan pemerintah daerah dalam merespons perubahan.

Rasio kemandirian keuangan daerah, yang sering disebut sebagai otonomi fiskal, merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan menggunakan sumber daya internal, seperti pajak daerah dan retribusi (Sonoto 2018; Putri and Munandar 2021). Rasio ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengurangi ketergantungan pada sumber dana

eksternal, seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan finansial dari luar, yang memungkinkan daerah memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang kebijakan dan program pembangunan (Sonoto 2018). Sebaliknya, rasio yang rendah mencerminkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber daya eksternal, yang dapat membatasi otonomi daerah dalam mengelola keuangan dan merespons kebutuhan masyarakat secara efektif (Maggara et al., 2024). Oleh karena itu, rasio ini menjadi parameter penting dalam mengevaluasi sejauh mana daerah memiliki kemandirian fiskal dan kapasitas untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pihak luar (Subianto, 2020). Rumus untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah adalah:

$$RK = \frac{PAD}{BP4}$$

Keterangan:

RK : Rasio Kemandirian

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BP4 : Bantuan pemerintah pusat/propinsi & pinjaman

Penelitian ini menggunakan data keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara yang diperoleh untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010. Berikut rinciannya:

Tabel.1: Pendapatan Asli Derah Dan Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi & Pinjaman Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008,2009 Dan 2010.

Akun Anggaran	Tahun		
	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
PAD	19,612,295, 878	15,181,573, 628	55,197,347, 421
BP4	396,141,155 ,216	399,063,015 ,625	311,963,771 ,388

Sumber: Data olahan, Sonoto 2018

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi dan data keuangan pada pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara yang diperoleh untuk tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010, maka rasio kemandirian keuangan dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Akun Anggaran	Tahun		
	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
PAD	19,612,295, 878	15,181,573, 628	55,197,347, 421
BP4	396,141,155 ,216	399,063,015 ,625	311,963,771 ,388
RK	0,0495	0,0380	0,1772

Sumber: Data olahan, 2025

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diatas, menunjukkan bahwa: (1) pada tahun 2008, Kabupaten Halmahera Utara memperoleh 0.0495 dari setiap satuan bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman yang digunakan sebagai PAD; (2) Pada tahun 2009, rasio kemandirian keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hanya memperoleh 0.0380 dari setiap bantuan yang diterima; (3) Pada tahun 2010, terjadi peningkatan

signifikan dalam rasio kemandirian keuangan daerah menjadi 0.1772, menunjukkan adanya peningkatan kontribusi PAD terhadap total bantuan yang diterima.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data dan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan, terdapat fluktuasi yang signifikan dalam rasio kemandirian keuangan Kabupaten Halmahera Utara antara tahun 2008 hingga 2010. Tahun 2008 dan 2009 menunjukkan rasio yang sangat rendah, di bawah 0.05, yang berarti bahwa PAD daerah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan bantuan yang diterima dari pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara sangat bergantung pada bantuan luar untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah (Amalia & Syawie, 2015).

Namun, pada tahun 2010, rasio kemandirian keuangan meningkat signifikan hingga mencapai 0.1772. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada perubahan dalam kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan pajak daerah, atau efektivitas dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan PAD (Berwulo, 2017). Ini juga mencerminkan adanya usaha untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat.

Hubungan dengan Kemampuan Adaptasi Pemerintah Daerah.

Kemampuan adaptasi pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan rasio kemandirian keuangan. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait hubungan tersebut:

1. **Pengelolaan Keuangan yang Lebih Efisien:** Peningkatan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengelola keuangan dengan lebih efisien. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat akan lebih fleksibel dan adaptif dalam merespon kebutuhan pembangunan dan perubahan kondisi ekonomi (Putri and Munandar 2021; Sonoto 2018).
2. **Peningkatan Daya Saing Daerah:** Daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang tinggi akan lebih mampu menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor yang dapat mendukung ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial dengan baik (Handraini et al., 2024)..
3. **Kesiapan Menghadapi Krisis Keuangan:** Pemerintah daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang tinggi akan lebih siap dalam menghadapi krisis atau ketidakpastian ekonomi, karena mereka tidak terlalu bergantung pada alokasi dana dari pusat atau pinjaman luar daerah (Putra & Hidayat, 2016).
4. **Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal:** Pemerintah daerah yang adaptif cenderung lebih berinovasi dalam mencari sumber pendapatan baru, seperti dengan meningkatkan potensi pajak daerah, retribusi, atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Peningkatan PAD yang signifikan pada tahun 2010 dapat menunjukkan adanya upaya dan inovasi dalam hal ini (Vlachos et al. 2007; Smit and Wandel 2006; Cagnin, Havas, and Saritas 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas hubungan rasio kemandirian keuangan dengan kemampuan adaptasi pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan adaptasi pemerintah daerah

terhadap perubahan ekonomi atau kebijakan fiskal secara nasional. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tren yang berbeda sepanjang periode 2008 hingga 2010, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang positif dalam kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Secara *Capacity Theory*, bahwa perubahan positif yang terlihat pada tahun 2010 mencerminkan perkembangan kapasitas inovasi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Ini mencakup aspek inovasi, pembelajaran, dan adaptasi terhadap perubahan eksternal, yang merupakan elemen penting dalam teori kapasitas dinamis (Cagnin, Havas, and Saritas 2013; Vlachos, Georgiadis, and Iakovou 2007; Smit and Wandel 2006).

Implikasi DCT terhadap teori akuntansi publik dan praktiknya mencakup peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan publik, adopsi inovasi dalam sistem akuntansi dan pelaporan, pengelolaan risiko, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan rasio kemandirian keuangan, seperti yang terlihat pada Kabupaten Halmahera Utara, mencerminkan keberhasilan dalam mengadaptasi teori-teori ini untuk mencapai pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan rasio kemandirian, penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio yang lainnya seperti rasio efisiensi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).
- Berwulo, L. L. D. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).
- Cagnin, C., Havas, A., & Saritas, O. (2013). Future-oriented technology analysis: Its potential to address disruptive transformations. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(3), 379–385.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600.
- Hanif, D. F., & Handoyo, S. E. (2024). Analisis Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2013-2023. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(7).
- jdih.setneg.go.id. (2025). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- M Taufan Rengganis. (2025, March 6). Cara Pemerintah Daerah Siasati Efisiensi Anggaran. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/cara-pemerintah-daerah-siasati-efisiensi-anggaran-1216131>
- Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Dan Dampaknya Pada Kemandirian Fiskal. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4).
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.
- Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 282–292.

- Sonoto, J. F. (2018). Analisis Kemandirian Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Halmahera Utara. *Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 2(1), 26–35.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Grasindo.
- Vlachos, D., Georgiadis, P., & Iakovou, E. (2007). A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains. *Computers & Operations Research*, 34(2), 367–394.